

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN SITUASI POLITIK DI KABUPATEN PEKALONGAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Gambaran umum tentang Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tahun 2020 secara statistik. Data yang digunakan dalam penulisan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. Data yang digunakan berkaitan dengan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Pekalongan secara umum. Pada subbab ini, penulis menyajikan data BPS yang hanya memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2.1.1 Kondisi Geografis

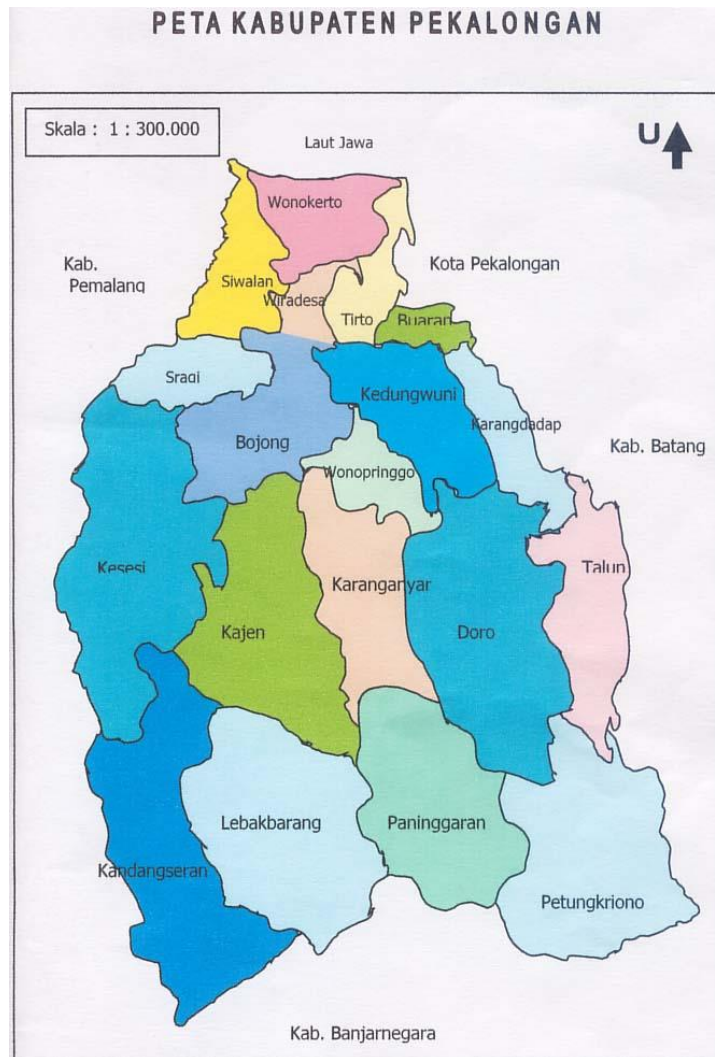
Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Posisinya terletak di daerah Pantura bagian barat dengan Kota Kaji sebagai pusat pemerintahan. Secara geografis, Kabupaten Pekalongan terletak antara 6°-7° 23' Lintang Selatan dan 109°78' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan:

Bagian Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Bagian Utara : Kota Pekalongan dan Laut Jawa;

Bagian Selatan: Kabupaten Banjarnegara; dan

Bagian Barat : Kabupaten Pemalang.



Gambar 1 Peta Kabupaten Pekalongan

Ibukota Kabupaten Pekalongan terletak di Kecamatan Kajen, dimana Kecamatan Kajen terletak ditengah-tengah Kabupaten Pekalongan. Jarak dari Ibukota Kabupaten Pekalongan paling dekat ke Ibukota Kota Pekalongan dan paling jauh ke Ibukota Kabupaten Brebes. Berikut ini jarak dari Ibukota Kabupaten Pekalongan ke Ibukota daerah sekitarnya jika dilihat berdasarkan angka (km):

Jarak ke Kabupaten Batang : 35 km;

Jarak ke Kabupaten Pemalang	: 51 km;
Jarak ke Kabupaten Tegal	: 94 km;
Jarak ke Kabupaten Brebes	: 92 km;
Jarak ke Kota Pekalongan	: 28 km;
Jarak ke Kota Tegal	: 79 km.

Pada tahun 2020, wilayah Kabupaten Pekalongan tercatat memiliki luas 836,13 km² dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Paninggaran yakni seluas 92,99 km², mayoritas lahannya masih berupa hutan. Sedangkan kecamatan paling sempit atau kecil adalah Kecamatan Buaran dengan luas 9,54 km².

Berkebalikan dengan Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Buaran menjadi kecamatan dengan mayoritas lahan digunakan sebagai rumah warga dan bangunan lainnya. Jarak ke Ibukota Kabupaten paling jauh ditempuh oleh warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Petungkriyono dengan jarak tempuh 34 km². Bukan hanya jaraknya yang jauh, akses jalan di kecamatan tersebut juga berkelok dan naik turun serta di beberapa tempat masih ditemui jalan rusak.

Melihat dari topografis wilayah, Kabupaten Pekalongan terdiri atas wilayah datar di bagian utara dan wilayah dataran tinggi di bagian selatan. Kecamatan Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto merupakan daerah pesisir pantai dengan ketinggian wilayah hanya 4m diatas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petungkriyono merupakan daerah pegunungan/ dataran tinggi. Curah hujan tertinggi terletak di Kecamatan Lebakbarang dengan rata-rata per tahun 5.321 mm. Sedangkan curah hujan terendah berada di Kecamatan Buaran dengan rata-rata per tahun 873 mm.¹

¹ <https://www.pekalongankab.go.id/index.php/pemerintahan/deskripsi-wilayah/kondisi-geografis>, diakses pada 12 November 2021 pukul 09:01 wib.

2.1.2 Kondisi Demografi

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan adalah 977.821 jiwa dengan jumlah terbanyak pada Kecamatan Kedungwuni sebanyak 100.796 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Lebakbarang dengan total 11.116 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun yang sama berjumlah 491.607 jiwa dengan penduduk perempuan berjumlah 477.214 jiwa².

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km
1	Kandangserang	35.745	60,55
2	Paninggaran	41.837	92,99
3	Lebakbarang	11.116	58,20
4	Petungkriyono	13.179	73,59
5	Talun	39.667	58,57
6	Doro	45.207	68,45
7	Karanganyar	45.088	63,48
8	Kajen	73.067	75,15
9	Kesesi	71.708	68,51
10	Sragi	65.451	32,40
11	Siwalan	41.447	25,91
12	Bojong	74.681	40,06
13	Wonopringgo	47.656	18,80

² <https://pekalongankab.bps.go.id/> , diakses pada 15 November 2021 pukul 06:44 wib.

14	Kedungwuni	100.796	22,93
15	Karangdadap	41.255	21,00
16	Buaran	47.022	9,54
17	Tirto	74.687	17,39
18	Wiradesa	62139	12,70
19	Wonokerto	46073	15,91

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Jumlah desa di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 280 desa. Desa paling banyak ada di Kecamatan Kajan berjumlah 24 desa dan desa paling sedikit ada di Kecamatan Buaran dengan 7 desa. Sedangkan jumlah kelurahan di Kabupaten Pekalongan hanya ada 8 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Kajan (1 kelurahan), Kecamatan Sragi (1 kelurahan), Kecamatan Kedungwuni (3 kelurahan), Kecamatan Buaran (3 kelurahan), dan paling banyak ada di Kecamatan Wiradesa (5 kelurahan).

Dalam bidang pendidikan, pada tahun yang sama, Kabupaten Pekalongan memiliki 336 sekolah TK dengan jumlah kelas sebanyak 335 kelas dan 2.630 guru TK. Pada tingkat selanjutnya, ada sejumlah 511 gedung sekolah dasar (SD) dengan 3.361 kelas, 69.926 murid dan 3.830 guru. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), ada 86 gedung SMP dengan 1.009 kelas, 30.383 murid, dan 1.636 guru. Selanjutnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Kabupaten Pekalonga telah menyediakan 18 gedung SMA dengan 8.625 murid dan 521 guru. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 tercatat sebesar 71,23. Sedangkan persentase penduduk miskinnya ada di angka 10,19%.

2.1.3 Dinamika Politik

Pekalongan merupakan kabupaten dengan total 20 (dua puluh) partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan anggota dewan, total 45 (empat puluh lima) kursi yang diperebutkan dengan 5 (lima) daerah pemilihan. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Pekalongan mengalami naik turun (fluktuatif) setiap periode.

Tahun Pileg	Partisipasi Pemilih
1999	92%
2004	85%
2009	69%
2014	72%
2019	78%

Tabel 2 Tingkat Partisipasi Pileg 5 Periode Terakhir

Pada 5 (lima) periode akhir pemilihan legislatif, partisipasi pemilih terpantau mengalami penurunan drastis pada tahun 2009. Namun pada periode selanjutnya mampu mengalami kenaikan partisipasi kembali. Sejak Pileg pada tahun 1999, jumlah 45 kursi yang diperebutkan selalu di duduki oleh mayoritas Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Desakan masyarakat atas reformasi dan keinginan mengganti anggota parlemen yang berhubungan dengan Orde Baru membuat Pileg pertama reformasi ini mengalahkan Partai Golkar yang semula selalu menduduki mayoritas kursi.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 1999, PDI-P meraup 17 kursi sedangkan PKB 10 kursi, kemudian disusul PPP, Golkar, dan PAN masing-masing 4 kursi. Pileg 2004 membalikkan kemenangan dengan PKB 15 kursi dan PDI-P 13 kursi. Saat Pileg dalam keadaan partisipasi lemah, PKB mampu bertahan dengan kemenangan 11 kursi disusul PDI-P lebih sedikit 1 kursi. Pileg selanjutnya yakni tahun 2014 dan 2019 masih ditempati PKB pada posisi teratas disusul dengan PDI-P di posisi kedua.

Tahun Pilbup	Partisipasi Pemilih
2006	74%
2011	68%
2015	70%
2020	77,75%

Tabel 3 Tingkat Partisipasi Pilbup 4 Periode Terakhir

Meskipun sempat mengalami penurunan partisipasi pemilih pada tahun 2011, namun pada periode berikutnya pemilih kembali meramaikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan kepala daerah. Bahkan pada tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 terjadi, antusias penggunaan suara semakin meningkat. Isu pencoblosan di tengah pandemi yang akan menyebabkan TPS sepi terbantahkan. Pembatasan kegiatan tidak menjadi alasan masyarakat tidak pergi untuk menggunakan hak suaranya.

Pada tahun 2020, partisipasi pilbup paling tinggi berada di Kecamatan Petungkriyono yaitu sebesar 89% dengan jumlah pemilih sebanyak 9.987 orang dan jumlah penggunasuara sebanyak 8.889 orang. Sedangkan partisipasi paling rendah

terletak di Kecamatan Wonokerto yaitu sebesar 69% dengan jumlah pemilih sebanyak 34.239 orang dan jumlah pengguna sebanyak 23.734 orang.

Berbicara mengenai kursi yang didapatkan di parlemen, tentunya memiliki keterkaitan dengan eksekutif. Partai dengan kursi terbanyak pastinya tidak absen dalam mengusung kandidat Kepala Daerah. Di Kabupaten Pekalongan, PDI-P dan PKB bukan hanya rival dalam meraup suara legislatif namun juga eksekutif. Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) 2006, kedua partai besar tersebut menjadi rival. PDI-P mengusung Drs. H. Amat Antono – H. A. Qurofi Hajin, BA sedangkan PKB berkoalisi dengan Golkar mengusung Dra. Hj. Siti Qomariyah, MA – Ir. H. Wahyudi Pontjo Nugroho. Suara dimenangkan secara tipis oleh kandidat PKB dengan persentase suara sah sebesar 52%.

Pada Pilbup 2011, dua partai besar yakni PDI-P dan PKB sempat menjadi koalisi dengan mengusung Dra.Hj. Siti Qomariyah, MA – Riswadi. Namun koalisi besar ini justru mengalami kekalahan. Terdapat 3 (tiga) pasangan calon lain yang mendaftarkan. Pemenangnya adalah pasangan calon Drs. Amat Antono, M.Si – Fadia Arafiq yang diusung oleh koalisis Partai Demokrat, Gerindra, PKB, dan PPP dengan presentase suara sah 57% sedangkan koalisi PDI-P dan PKB di urutan kedua dengan presentase 37%.

Lima tahun berikutnya, pada tahun 2015, kedua partai berdiri masing-masing. PDI-P mengajukan calon pasangan H. Riswadi, S.H – Hj. Nurbalistik sedangkan PKB mengusung H. Asip Kholbihi, S.H., M.Si – Ir. Hj Arini Harimurti. Kemenangan diraih sangat tipis oleh pasangan dari PKB dengan presentase 50,30%.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020, jumlah pemilih dalam DPT tercatat sebanyak 720.654 jiwa, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) sebanyak 293 jiwa, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik maupun surat keterangan (DPTb) sebanyak 723.598 jiwa. Sedangkan data pemilih DPT sebanyak 559.413 jiwa,

jumlah pemilih DPPH yang menggunakan suaranya sebanyak 288 jiwa, dan DPTb yang menggunakan hak suaranya sebanyak 562.352 jiwa.

Dari data tersebut, ada total jumlah suara sebanyak 562.352 dengan rincian berupa 549.996 jumlah suara sah dan 12.356 jumlah suara tidak sah. Merujuk dari data perolehan suara pasangan calon, pasangan Asip Kholbihi dan Sumarwati sebagai paslon 01 mendapatkan suara sebanyak 237.440 suara sedangkan rivalnya, pasangan Fadia Arafik dan Riswadi unggul dengan mengantongi 312.556 suara. Mayoritas suara yang didapatkan oleh Fadia Arafik dan Riswadi tersebut akhirnya membawa mereka menduduki kursi kepala daerah untuk periode selanjutnya.

2.1.4 Profil Kandidat Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Pada Pilkada serentak 2020, Kabupaten Pekalongan ditempatkan pada pilihan sulit. Kedua kandidat merupakan sosok yang sudah dikenal masyarakat Pekalongan secara luas. Keduanya juga pernah menduduki jabatan politis di Kabupaten Pekalongan. Asip Kholbihi, sebagai bupati petahana merupakan politisi asal PKB yang memiliki kedekatan dengan ulama dan kyai. Eksistensinya di Kabupaten Pekalongan tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun 2015, beliau maju mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan bergandengan dengan Arini Harimurti yang merupakan istri dari Amat Antono (Bupati Pekalongan periode 2001-2006 dan 2011-2016). Pada pilkada tahun ini beliau menggandeng Sumarwati sebagai calon wakil bupati.

Sumarwati merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 1992 beliau aktif dalam jajaran pengurus Fatayat Anak Cabang Bojong, selanjutnya pada tahun 1993 masuk kepengurusan tingkat Kabupaten pekalongan, kemudian pada periode 1997-2004 diamanahi sebagai Ketua Fatayat NU Cabang Kabupaten Pekalongan. Beliau sempat menjadi Ketua PGRI Cabsus Dindik

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2009-2010. Kemudian menjadi ketua umum Muslimat NU Cabang Kabupaten pekalongan tahun 2015-2020 dan menjadi ketua PAS KONI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017-2020.

Rivalnya, Fadia A Rafiq merupakan wakil bupati Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016 yang berpasangan dengan Amat Antono. Beliau merupakan Ketua DPD Kabupaten Pekalongan Golkar sekaligus Ketua KNPI JawaTengah pada periode 2016-2021. Kepopuleran sosok Fadia juga didapatkan dari ayahnya yang merupakan pedangdut senior Indonesia, A. Rafiq. Pasangan politiknya, Riswadi, merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Pekalongan.

Riswadi pernah maju dalam Pilbup 2011 dan 2015 namun mengalami kekalahan. Rekam jejak politik Riswadi cukup bersinar di legislatif. Pada periode jabatan DPRD 2009-2014 beliau menjabat sebagai ketua komisi A. Kemudian pada periode 2014-2015 menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan menduduki jabatan tersebut lagi pada periode 2019-2024 namun harus melakukan PAW untuk mencalonkan sebagai calon wakil kepala daerah.

Pasangan calon nomor urut 1, Asip Kholbihi dan Sumarwati mendaftarkan 20 akun media sosial dengan rincian 13 akun facebook, 4 akun instagram, 2 akun youtube, dan 1 akun twitter. Sedangkan calon nomor urut 2, Fadia Arafik dan Riswadi mendaftarkan 6 akun media sosial yang terdiri dari 5 akun facebook dan 1 akun instagram. Bagi publik, media sosial dapat digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi dan dapat dijadikan aktualisasi partisipasi politik. Sedangkan bagi politisi, media massa dapat digunakan sebagai media dalam membangun komunikasi dengan publik, sumber penyebaran informasi dan dapat menjadi wadah interaksi dengan masyarakat dalam menetapkan kebijakan.

Media sosial juga dapat digunakan untuk memengaruhi pilihan politik pemilih hingga memantau hasil pemilu. Dalam politik praktis, media sosial memiliki banyak manfaat strategis dan akan semakin penting kehadirannya pada masa depan.

Pemilihan umum di Indonesia semakin menunjukkan peran media sosial telah menyumbangkan manfaat bagi marketing politik baik bagi pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada dalam promosi kandidat calon terhadap publik.